

PERAN MASYARAKAT LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA FATUMNASI, TIMOR TENGAH SELATAN

Hans Lao¹; Enos Kabu²; Hamzah Nazarudin³

Politeknik Negeri Kupang, Kota Kupang^{1,2,3}

Email : hanslao@pnk.ac.id; enos.kabu@pnk.ac.id²; hamzah.nazarudin@pnk.ac.id³

ABSTRAK

Kabupaten Timor Tengah Selatan, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki banyak potensi alam yang dapat dijadikan sumber daya pariwisata, termasuk di desa Fatumnasi. Untuk mengoptimalkan potensi alam tersebut, partisipasi aktif masyarakat lokal menjadi krusial dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pengembangan desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan model analisis Miles & Huberman. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan peran masyarakat berdasarkan empat dimensi kebijakan publik yang dikenal sebagai Model Edwar III, yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Kata kunci : wisata alam; Fatumnasi; Model Edward III; struktur birokrasi

ABSTRACT

South Central Timor Regency, part of East Nusa Tenggara Province, has abundant natural potential that can be utilized as tourism resources, including in Fatumnasi village. To optimize these natural potentials, active participation of the local community is crucial in supporting government policies related to the development of the village. This research adopts a qualitative approach utilizing both primary and secondary data. Data collection is conducted through interviews, observations, and documentation, with qualitative descriptive data analysis using the Miles & Huberman analysis model. The aim of this study is to formulate the roles of the community based on four dimensions of public policy known as the Edward III Model, namely communication, resources, implementation attitudes, and bureaucratic structure.

Keywords : natural tourism; Fatumnasi; Edward III Model; bureaucratic structure

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi beragam tantangan sosial, termasuk masalah kemiskinan (Nalle et al., 2022). Sebagai upaya penanggulangan, sektor pariwisata dipandang sebagai motor penggerak yang dapat membantu mengatasi persoalan kemiskinan tersebut. Langkah ini didorong oleh besarnya potensi pariwisata yang ada di provinsi ini. Saat ini terdapat sekitar 443 objek wisata dengan berbagai tema di wilayah tersebut, meliputi wisata alam, wisata budaya, dan atraksi buatan (BPS NTT,

2018). Namun, belum semua potensi pariwisata yang ada ini dimanfaatkan dengan maksimal.

Sektor pariwisata telah dipilih oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk menjadi pendorong utama pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang diiringi oleh pembangunan infrastruktur pariwisata seperti penginapan dan rumah makan di sekitar destinasi wisata, diharapkan akan menciptakan peluang berwirausaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Melalui langkah-langkah ini, pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam mengatasi masalah sosial di NTT, seperti masalah kemiskinan dan masalah kesehatan (Fanggidae & Seran, 2021).

Pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT secara menyeluruh, baik secara fisik maupun psikologis (Manafe et al., 2016). Diharapkan dengan pengembangan yang baik terhadap destinasi pariwisata, akan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal (Marlina & Hidayati, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Implementasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan terdiri dari serangkaian langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum memulai proses implementasi, penting untuk mengidentifikasi tujuan yang jelas serta merancang program yang tepat untuk mencapainya. Langkah-langkah ini harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai agar program dapat dilaksanakan secara efektif (Fajarwati & Rahmadilla, 2022). Nugroho (2023) mendefinisikan kebijakan publik merupakan respons terhadap suatu permasalahan, dimana bertujuan untuk menyelesaikan, mengurangi, dan mencegah dampak negatif, serta sebaliknya, mendukung, menginisiasi, dan mempromosikan terciptanya dampak positif dengan cara yang terbaik dan terarah.

Model Edwar III, yang dikembangkan oleh Putra and Khaidir (2019), menyoroti pentingnya empat faktor kunci dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Objek wisata, baik itu alam maupun buatan, memiliki nilai dan keunikan yang menarik bagi wisatawan. Pengembangan dan pengelolaan objek wisata membutuhkan perencanaan yang matang serta pengelolaan yang berkelanjutan agar dapat memaksimalkan potensi dan manfaatnya bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitar (Keliwar & Nurcahyo, 2015). Menurut Surat Keputusan Menparpostel Nomor Km 98 PW. 102 MPPT-87, objek wisata didefinisikan sebagai lokasi atau kondisi alam yang memiliki potensi sumber daya alam yang telah dikelola dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik yang diupayakan sebagai tujuan kunjungan bagi para wisatawan.

Perkembangan industri pariwisata telah melahirkan dua arus utama yang menjadi ciri khas dalam prakteknya di seluruh dunia, yaitu pariwisata massal (mass tourism) (Nucahyo et al., 2023) dan pariwisata alternatif (alternative tourism) (Amerta, 2019). Kedua arus ini memiliki pendekatan konseptual yang berbeda, namun keduanya memberikan dampak signifikan dalam dunia pariwisata (Parma, 2013). Pariwisata massal, sebagai arus utama yang dominan, sering kali mencakup aktivitas yang melibatkan banyak unsur dan menarik pengunjung dalam jumlah yang banyak. Meskipun tidak ada definisi baku yang menggambarkan pariwisata massal, namun secara umum, hal ini merujuk pada kegiatan pariwisata yang menghasilkan dampak yang masif, baik ditinjau dari sisi sosial ataupun ekonomi (Siswanto et al., 2012). Kedatangan wisatawan yang banyak secara bersamaan mampu meningkatkan pendapatan dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi destinasi wisata. Namun, di sisi lain, pariwisata massal juga sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, kebisingan, kemacetan, dan over-tourism di beberapa destinasi populer.

Di sisi lain, pariwisata alternatif menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan pada keberlanjutan lingkungan dan budaya serta pengalaman yang lebih intim bagi wisatawan. Meskipun jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi pariwisata alternatif cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan pariwisata massal, namun pengalaman yang diperoleh oleh wisatawan cenderung lebih mendalam dan berarti. Pariwisata alternatif mengarah pada pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat lokal, dan pemeliharaan budaya setempat (Harris et al., 2012). Jenis-jenis pariwisata alternatif, seperti green tourism, geotourism, responsible tourism, dan sustainable

tourism, menawarkan berbagai macam pengalaman dan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada di destinasi wisata dengan cara yang bertanggung jawab (Parma, 2013). Dengan demikian, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab telah menjadi fokus penting dalam industri pariwisata modern. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat lokal di seluruh dunia diharapkan untuk bekerja sama dalam mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan, yang mampu memberikan dampak ekonomis yang positif dan juga melindungi sumber daya alam dan warisan budaya untuk generasi mendatang.

Dari beragam jenis pariwisata yang ada, pada dasarnya mereka memiliki kesamaan yang mencakup beberapa aspek. Pertama, fokus utama pada kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pengembangan pariwisata. Kedua, melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Ketiga, menekankan pentingnya proses pencarian pengetahuan dan pemahaman tentang alam dan budaya lokal sebagai bagian dari pengalaman wisata. Keempat, memberikan pengalaman yang lebih dalam dan bermakna bagi wisatawan terhadap objek wisata yang mereka kunjungi. Selanjutnya, Garrod (2003) menyampaikan bahwa terdapat dua pendekatan perencanaan yang terkait dengan prinsip-prinsip pariwisata. Pertama, pendekatan formal yang menitikberatkan pada potensi keuntungan dari ekowisata. Kedua, pendekatan yang lebih berorientasi pada perencanaan partisipatif, yang menekankan pada keseimbangan antara pembangunan dan perencanaan yang terkontrol.

Salah satu contoh dari pendekatan partisipatif dalam pengembangan pariwisata adalah Community Based Tourism (CBT), yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan manajemen pariwisata. Ini sesuai dengan pandangan Häusler (2006) yang menyoroti peran penduduk lokal dalam mengembangkan pedesaan wisata yang mengutamakan kearifan lokal. Giampiccoli and Saayman (2018) menggambarkan community based tourism dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dari aspek lingkungan, sosial, dan budaya. Dengan demikian, CBT menjadi wujud konkret dari upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam pengembangan pariwisata dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di desa Fatumnasi. Subjek penelitian terdiri dari beberapa pihak, yaitu informan utama yang merupakan pelaku usaha pariwisata di desa Fatumnasi, petugas dari dinas pariwisata di desa Fatumnasi, wisatawan yang berkunjung, serta masyarakat lokal (penduduk) yang tinggal di sekitar objek wisata di desa Fatumnasi. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang diusulkan oleh Miles and Huberman (1994).

Lihat Gambar 1. Komponen Analisis Miles & Huberman

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: Reduksi Data: Tahap ini melibatkan merangkum catatan lapangan dengan memilah elemen-elemen kunci yang terkait dengan permasalahan penelitian. Proses reduksi data membantu untuk menyederhanakan informasi yang telah dikumpulkan sehingga hanya elemen yang paling relevan dan penting yang dipertahankan.

Penyajian Data: Pada tahap ini, data kualitatif disusun secara sistematis dan dipresentasikan dengan cara yang mudah dipahami. Proses ini melibatkan mencari dan menyusun data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar dapat diinformasikan kepada orang lain dengan jelas dan efektif. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan temuan secara komprehensif dan memfasilitasi proses interpretasi dan analisis lebih lanjut.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Undang-undang No 23 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintah di tingkat daerah bersama DPRD, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Sehingga diharapkan agar dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu tugas utama dari Pemerintah Daerah Kupang yang mengelola objek wisata Desa Fatumnasi. Peran pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata Desa Fatumnasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang sesuai

dengan tujuan tertentu yang disepakati, bukan sekadar keputusan acak untuk melakukan sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga berdasarkan kepentingan masyarakat.

Kebijakan ini memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengendalikan masyarakat dalam mencapai visi pemerintah dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat. Penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat menjadi fokus utama, sehingga partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan tersebut sangatlah vital untuk mempercepat pembangunan di daerah. Kebijakan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Langkah awal peran Pemerintah Daerah dalam tahap sosialisasi dimulai dengan melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Bupati nomor 21 Tahun 2011 tentang Objek Wisata. Tahap sosialisasi ini menjadi langkah krusial pertama bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mengatur pariwisata dan meningkatkan infrastruktur wisata di Desa Fatumnasi.

Dalam tahap sosialisasi dengan Pokdarwis (Pokok Pikiran Desa Wisata), pembinaan menjadi fokus utama. Pembinaan ini mencakup serangkaian upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peranannya dalam mendukung pengembangan pariwisata di Pantai Oetune. Sasaran pembinaan Pokdarwis meliputi peningkatan kapasitas anggotanya agar lebih terampil dan berperan aktif dalam mengelola dan mempromosikan potensi pariwisata di desa tersebut. Selain itu, pembinaan juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan Pokdarwis di Desa Fatumnasi, sehingga lebih banyak warga desa yang terlibat dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah daerah dan pelaku pariwisata lainnya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pengembangan pariwisata lokal. Selain itu, pembinaan Pokdarwis juga bertujuan untuk membentuk basis data yang lebih komprehensif dan terstruktur mengenai potensi dan kinerja Pokdarwis. Basis data yang ada akan menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis secara lebih efektif. Dengan memiliki data yang lengkap dan akurat, pihak terkait dapat mengidentifikasi kebutuhan dan peluang yang ada, serta merancang program-program yang tepat sasaran untuk meningkatkan peran dan kontribusi Pokdarwis dalam mendukung pembangunan pariwisata desa. Obyek wisata Desa Fatumnasi menawarkan beragam lokasi dan objek wisata yang menakjubkan, termasuk danau yang indah, hutan bonsai yang memukau, dan pegunungan marmer

yang menakjubkan. Namun, infrastruktur jalan masih menjadi perhatian utama, terutama dengan banyaknya jalan rusak di beberapa titik, terutama menuju ke lokasi danau, serta jalanan yang sempit yang menyulitkan para pengendara mobil saat berpapasan. Selain itu, desa Fatumnasi belum memiliki penyediaan air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, sering kali menyebabkan kekurangan air di fasilitas kebersihan, dan penempatan bak sampah yang belum mencukupi seluruh daerah objek wisata.

Beberapa entitas swasta telah turut serta dalam upaya pembangunan fasilitas MCK di homestay Lopo Mutis. Namun, pihak LSM sendiri belum turun langsung mendampingi pengembangan sektor pariwisata di Desa Fatumnasi. Sementara itu, pemerintah telah melaksanakan pendampingan melalui serangkaian pelatihan terkait sektor pariwisata, seperti pelatihan di bidang pengembangan tenun ikat dan pengolahan pangan lokal. LSM/NGO yang terlibat dalam bidang pariwisata lebih memfokuskan diri pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, yang didukung oleh lembaga pemerintahan setempat untuk mencapai kemajuan di sektor kepariwisataan.

Mayoritas penduduk Desa Fatumnasi bekerja sebagai petani dan belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai bagian dari potensi pariwisata, meskipun desa ini memiliki potensi agrowisata yang besar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam sektor pariwisata, langkah utama adalah dengan mengembangkan sektor pertanian sebagai bagian integral dari pariwisata, bukan memaksa mereka untuk mengubah profesi mereka. Penduduk desa telah menerima beberapa pelatihan dari penyuluh pertanian dan bantuan bibit sapi, meskipun intensitas pelatihan dan pendampingan yang diberikan masih belum memadai. Politeknik Negeri Kupang sebagai salah satu perguruan tinggi telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas komunikasi penduduk desa, tetapi upaya ini juga masih perlu ditingkatkan untuk mencapai dampak yang lebih signifikan.

Gambaran di atas memberikan ilustrasi yang jelas bahwa Desa Fatumnasi memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pariwisata. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah dalam pengembangan potensi sumber daya tersebut. Pemerintah daerah dan instansi terkait belum sepenuhnya melaksanakan pelatihan demi peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar destinasi pariwisata. Program-program kepariwisataan seringkali tidak direalisasikan sepenuhnya,

menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap gagasan pengembangan pariwisata. Hal ini juga terjadi di Desa Fatumnasi, di mana beberapa usulan terkait penyiapan dan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata belum terealisasi dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan anggaran atau bukan menjadi prioritas.

Menurut Garrod (2003), elemen-elemen dari perencanaan pariwisata partisipatif yang sukses meliputi kepemimpinan yang efektif, pemberdayaan masyarakat lokal, mengaitkan keuntungan ekonomi dengan konservasi, melibatkan stakeholder lokal dalam setiap tahapan proyek, dan partisipasi lokal dalam monitoring dan evaluasi proyek. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Desa Fatumnasi mencakup berbagai bentuk, seperti memberikan sumbangan pemikiran, usulan, dan saran melalui rapat-rapat terkait perencanaan, serta melalui kegiatan kelompok sadar wisata dan pertemuan yang diadakan oleh instansi terkait. Selain itu, mereka juga berkontribusi dengan tenaga dalam pembangunan infrastruktur pariwisata dan menjaga kebersihan lingkungan.

Penduduk Desa Fatumnasi terlibat dalam usaha penginapan, penyewaan hewan ternak, bisnis tenun ikat, dan pengolahan makanan dengan berbahan lokal. Pelatihan-pelatihan telah dilakukan, seperti pelatihan pengolahan kuliner dan metode pencelupan benang. Di samping itu, beberapa usaha pertanian dan peternakan juga dijalankan sebagai potensi agrowisata. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Fatumnasi belum mencapai tahap citizen power, di mana mereka memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Saat ini, tingkat partisipasi masih pada tahap tokenism, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat tetapi belum memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa aspirasi mereka ditindaklanjuti. Dengan demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Desa Fatumnasi.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat lokal di Desa Fatumnasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi dalam aktivitas yang langsung dan yang tidak langsung berhubungan dengan kepariwisataan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut seperti usaha penginapan, penyewaan kuda, usaha tenun ikat, pengolahan kuliner berbahan lokal, pertanian, dan peternakan. Dalam hal tingkat partisipasi, masyarakat lokal di Desa Fatumnasi dapat dikategorikan sebagai partisipasi tokenism, menurut konsep ladder of participation. Hal

ini berarti bahwa meskipun masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam sektor pariwisata, namun mereka tidak memiliki kemampuan atau sarana yang memadai untuk mendukung partisipasi mereka secara efektif. Ini mencakup keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, serta kurangnya infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan dukungan infrastruktur agar partisipasi masyarakat lokal dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata Desa Fatumnasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

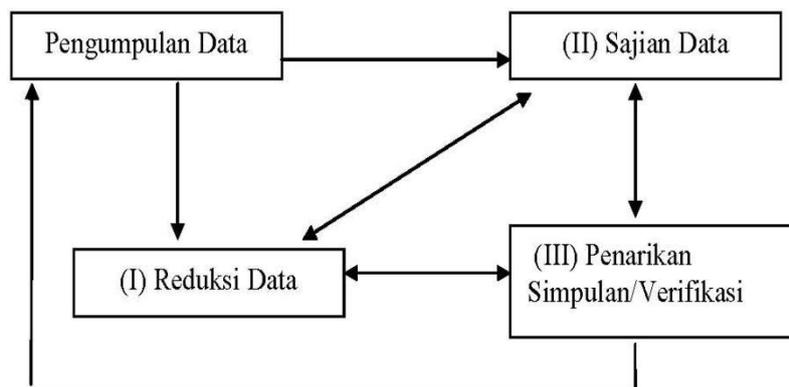
Tim penulis berterima kasih kepada Politeknik Negeri Kupang yang telah berkontribusi secara materiil dan moril dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amerta, I. M. S. (2019). *Pengembangan pariwisata alternatif*. Scopindo Media Pustaka.
- Fanggidae, J. P., & Seran, P. (2021). Willingness to Pay for Premium Tourism Services. International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020),
- Garrod, B. (2003). Local participation in the planning and management of ecotourism: A revised model approach. *Journal of Ecotourism*, 2(1), 33-53.
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 7(4), 1-27.
- Harris, R., Williams, P., & Griffin, T. (2012). *Sustainable tourism*. Routledge.
- Häusler, N. (2006). Profession: Tourism Consultant Mission: To Say Sometimes No To Community-Based Tourism Projects. *Tourism and the New Asia. Implications for Research, Policy and Practice. Conference Proceedings*,
- Keliwar, S., & Nurcahyo, A. (2015). Motivasi dan persepsi pengunjung terhadap obyek wisata desa budaya pampang di Samarinda. *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*, 12(2).
- Manafe, J. D., Setyorini, T., & Alang, Y. A. (2016). Pemasaran Pariwisata Melalui Strategi Promosi Objek Wisata Alam, Seni dan Budaya (Studi Kasus di Pulau Rote NTT). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 101-123.
- Marlina, L., & Hidayati, N. (2023). Peran Pariwisata Berbasis Industri dalam Pengembangan Bisnis di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 1(01), 31-40.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nalle, F. W., Seran, S., & Bria, F. (2022). Analisis Determinan Kemiskinan Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 206-220.
- Nucahyo, A., Keliwar, S., Noor, M. F., Iswandari, R. K., & Uhai, S. (2023). Pariwisata Massal Berkualitas di Kawasan Wisata Bukit Mahoni. *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research*, 5(02), 206-217.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.

- Parma, I. P. G. (2013). Kontribusi Pariwisata Alternatif Dalam Kaitannya Dengan Kearifan Lokal dan Keberlangsungan Lingkungan Alam. *Jurnal Perhotelan Undiksha*, 10(2).
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional regulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 15(1), 236-242.
- Siswanto, H., Anggoro, S., & Sasongko, D. P. (2012). Strategi optimasi wisata massal di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Grojogan Sewu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(2), 100-110.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Komponen Analisis Miles & Huberman